

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Rencana penambangan pasir besi di Kabupaten Kulon Progo merupakan tujuan dari Pemerintah Kabupaten Kulon Progo. Tujuan dari penambangan pasir besi adalah untuk meningkatkan pendapatan daerah serta mengurangi pengangguran yang ada di Kabupaten Kulon Progo. Hal demikian dianggap akan mensejahterakan masyarakat pesisir pantai pada khususnya dan masyarakat Kulon Progo pada umumnya. Pemerintah melakukan kebijakan penambangan pasir besi ini dengan menunjuk investor yaitu PT Jogja Magasa Iron (PT JMI). PT JMI akan mengeruk bijih besi yang ada di pesisir Kabupaten Kulon Progo dan akan diolah menjadi bahan baku.

Rencana penambangan pasir besi di Kabupaten Kulon Progo mengundang pro dan kontra di masyarakat pesisir dengan pemerintah. Pemerintah melakukan kebijakan penambangan ini bahwa adanya penambangan lahan bekas penambangan tidak akan rusak karena setelah penambangan dilakukan reklamasi, disamping itu masyarakat juga diuntungkan dengan ganti rugi lahan serta penambangan ini akan menguntungkan dengan cara bagi hasil dan royalti yang didapat.

Hal ini berbeda dengan anggapan dari masyarakat bahwa adanya penambangan pasir besi akan menyengsarakan masyarakat sekitar

penambangan pasir besi. Petani lahan pantai akan kehilangan mata pencaharian mereka satu-satunya yaitu sebagai petani di lahan pantai. Masyarakat juga khawatir dampak yang ditimbulkan akibat penambangan pasir besi, yaitu naiknya air laut ke permukaan tanah serta kerusakan lingkungan dan akan terjadinya semburan lumpur seperti di Porong, Sidoarjo.

Masyarakat petani lahan pantai yang menolak rencana penambangan pasir besi dengan cara terus melakukan penanaman di area lahan pantai. Masyarakat juga tidak mengakui bahwa lahan yang selama ini mereka tanami adalah tanah Paku Alam Ground. Masyarakat beranggapan bahwa tanah itu adalah milik mereka yaitu warisan dari nenek moyang mereka dan tanah Negara yang sudah diolah selama puluhan tahun. Masyarakat pesisir yang mengolah dari lahan tidur menjadi lahan yang produktif untuk pertanian.

Konflik rencana penambangan pasir besi ini melibatkan banyak aktor di dalamnya. Aktor-aktor itu adalah Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, DPRD Kabupaten Kulon Progo, Masyarakat, dan Penambang. Konflik ini tidak hanya terjadi antara pemerintah dengan masyarakat. Konflik ini juga terjadi antara masyarakat dengan masyarakat. Jadi dalam konflik ini terdapat konflik vertikal dan horizontal. Aplikasi konflik vertikal yang terjadi adalah konflik antara masyarakat kontra dengan pemerintah bersama penambang pasir besi (PT JMI), sedangkan konflik horizontal adalah konflik antara masyarakat pro dan masyarakat kontra penambangan pasir besi.

Konflik rencana penambangan pasir besi ini dilatarbelakangi adanya kesimpangsiuran informasi. Informasi yang diperoleh masyarakat satu dengan yang lain tidak sama sehingga masyarakat sudah tidak percaya dengan pemerintah. Kehadiran pemerintah dan penambang dianggap memperkeruh suasana di daerah pesisir. Masyarakat sudah nyaman dengan pekerjaan sebagai petani dianggap lebih makmur daripada adanya penambangan pasir besi.

Dinamika konflik yang terjadi pada rencana penambangan pasir besi ini adalah konflik kepentingan. Masyarakat dengan PPLP menyambut kebijakan pemerintah dengan perlawanan tiada henti untuk menggagalkan program yang sedang digalakkan oleh pemerintah yaitu rencana penambangan pasir besi. Masing-masing itu mempunyai kepentingan tercapainya tujuan yang diinginkan.

Konflik rencana penambangan pasir besi membuat hubungan masyarakat pro dan kontra menjadi renggang. Masyarakat kontra sebagai kaum mayoritas mengucilkan masyarakat minoritas/pro. Hukum adat yang dibuat masyarakat dan sudah disepakati bersama itu dianggap jalan untuk bersatu melawan penjajah yang akan membunuh saudaranya sendiri. Ketidakharmonisan dikalangan masyarakat pro dan kontra membuat luntarnya nilai-nilai kebudayaan, dilain sisi masyarakat sesama kontra membuat erat persatuan dibawah naungan PPLP bersatu menolak rencana penambangan pasir besi. Jadi, dilihat dari sudut pandang bahwa konflik rencana

penambangan pasir besi ini adalah konflik kepentingan yang berimbas pada masyarakat pesisir.

B. Saran

1. Untuk Pemerintah Kabupaten Kulon Progo

Rencana penambangan pasir besi di wilayah pesisir selatan Kabupaten Kulon Progo yang notabenenya adalah kawasan pertanian warga dan merupakan satu-satunya mata pencaharian warga pesisir diharapkan pemerintah meninjau ulang kebijakan melakukan penambangan pasir besi. Masyarakat telah mandiri bertani dengan hasil yang melimpah merupakan keunggulan yang perlu diperhatikan. Pemerintah mengkaji ulang dampak yang akan terjadi baik dampak secara moril maupun materiil bagi masyarakat pesisir.

2. Untuk Masyarakat Desa Garongan

Masyarakat pesisir selatan Kulon Progo khususnya menyikapi kebijakan pemerintah melakukan penambangan pasir besi diharapkan tidak melakukan tindakan yang melanggar hukum dan dapat menyelesaikan permasalahan yang ada dengan cara baik-baik. Masyarakat harus semangat bertani agar hasil pertanian melimpah dan dapat ditunjukkan kepada pemerintah dan masyarakat lain kalau petani pesisir bisa lebih maju dibandingkan wilayah lain.

3. Untuk PT Jogja Magasa Iron

PT Jogja Magasa Iron (PT JMI) diharapkan harus senantiasa menjalin komunikasi yang baik dengan pemerintah dan masyarakat. Apabila penambangan pasir besi benar-benar terealisasi maka, PT JMI dalam melakukan penambangan sesuai dengan AMDAL dan Kontrak Karya yang sudah disepakati.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, Wahid Situmorang. 2007. *Gerakan Sosial, Studi Kasus Beberapa Perlawanan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ahmadi, Abu. 2004. *Sosiologi Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Andika Galih Sitasari. 2009. Studi Identifikasi Pengelolaan Tambang Pasir Besi di Kabupaten Kulon Progo. *Skripsi-S1*. Universitas Diponegoro. Semarang.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Kulon Progo. 2010. *Kabupaten Kulon Progo Dalam Angka, Kulon Progo Regency in Figures 2010*. Yogyakarta: Perdana Karya Utama.
- Dean G Pruit dan Jeffrey Z. Rubin. 2004. *Teori Konflik Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Diana Francis. 2006. *Teori Dasar Transformasi Konflik Sosial*. Yogyakarta: Quills.
- Denzin, K. Norman. 2009. *Qualitative Research*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- JogjaMagasa Mining. 2007. *Integrated Iron Making Development Project KulonProgo -Yogyakarta*. Yogyakarta. JMM
- Lexy.J Moleong. 2005. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Miles danHuberman.2002. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: UI PRESS
- Novri Susan. 2010. *Pengantar Sosiologi Konflik dan Isu-Isu Konflik Kontemporer*. Jakarta: Kencana.
- Paguyuban Petani Lahan Pantai –Kulon Progo. 2011. *Bertani atau Mati. Tolak Tambang Besi*. Kulon Progo tolak tambang besi. Word press. com/2011/02/10/rekam-jejak-perjuangan-masyarakat-pesisir-kulon-progo-versi-singkat/ diakses pada minggu 5/7/2012.
- Poloma, Margaret M. 2007. *Sosiologi Kontemporer*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

- Ritzer, George. 2004. *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta: Kencana
- S.N. Kartikasari. 2001. *Mengelola Konflik*. Jakarta: SMK Grafika Desa Putra.
- Soerjono, Soekamto. 2006. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono. 2010. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: ALFABETA.
- Suharsimi, Arikunto. 1998. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Tim Riset Sistematis. 2009. *Memahami dan Menemukan Jalan Keluar dari Problem Agraria dan Krisis Sosial Ekologi*. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Pertanian Nasional.
- Usman Husaini, dkk. 1995. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Bhumi Aksara.
- Wardi Bachtiar. 2006. *Sosiologi Klasik*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Wirawan. 2010. *Konflik dan Manajemen Konflik*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Yulianti, Yayuk. 2003. *Sosiologi Pedesaan*. Yogyakarta: Lappera Pustaka Utama.
- Zumbon. 2012. *Konflik Penambang Pasir Besi Kulon Progo*.
<http://zumbon5.wordpress.com/2012/01/15/konflik-penambang-pasir-besi-kulonprogo-diy/> diakses pada tanggal 1 februari 2012.